

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas pemerintahan yang baik, menunjukkan bahwa tuntutan akuntabilitas juga semakin menguat, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja pegawai agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah memiliki peranan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang diberikan dan masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik seiring adanya perkembangan teknologi dan ekonomi. Hal tersebut yang membuat akuntabilitas pada organisasi sektor publik semakin menguat.

Maraknya globalisasi juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah Daerah yang disebabkan adanya tuntutan daya saing di setiap negara. Daya saing Pemerintah Daerah dapat dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak penuh dalam melakukan pengelolaan keuangan dimana dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel secara efektif, efisien, dan transparan. Maka dari itu, akuntabilitas dianggap sangat penting bagi masyarakat agar dapat menjamin mutu pemerintahan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil dan kinerja organisasi serta penjelasan mengenai keputusan dan proses

yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.² Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah diwujudkan dengan keterbukaan informasi mengenai manajemen pengelolaan keuangan pemerintah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki informasi yang bermanfaat dan memenuhi karakteristik kualitatif. Informasi keuangan yang disajikan harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bagi pihak tertentu. Dengan begitu, diharapkan dapat membawa kualitas pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; serta pemerintah. Didalamnya dijelaskan pula mengenai karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.³

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan salah satu dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal yang berarti laporan keuangan harus

² Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hal. 2

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

disajikan dengan jujur atau sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi. Berikut perilaku jujur yang dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 70:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”. (Q.S Al-Ahzab 33: 70).

Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan selalu menegakkan kejujuran bagi orang-orang mukmin. Bertakwa disini memiliki arti yaitu seruan untuk menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang-Nya. Sedangkan jujur dalam ayat tersebut berarti mengatakan apa adanya sesuai apa yang terjadi tanpa ada yang disembunyikan. Maka Dengan begitu, kaitannya ayat ini dengan penyajian laporan keuangan yaitu bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan diikuti dengan bukti pendukung agar dapat diakui kebenarannya.

Keempat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dikelola pemerintah. Apabila informasi yang terdapat di dalam

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. ke-1, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 494

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah terpenuhi sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka artinya pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Namun, apabila informasi yang tercantum tidak memenuhi kriteria maka akan menimbulkan ketidakefisienan, ketidakefektifan, kerugian daerah, potensi kerugian daerah, penyimpangan administrasi, dan kekurangan penerimaan.⁵

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Opini yang diberikan BPK ada 4 jenis yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TP), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP artinya telah menyajikan LKPD secara wajar dan berkualitas. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penyimpangan dan penyajian data yang tidak sesuai perundang-undangan yang berhasil ditemukan BPK dalam melakukan audit laporan keuangan pemerintah. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 dilaporkan bahwasannya dari hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD Tahun 2018 telah ditemukan kelemahan Sistem Pengendalian

⁵ Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, September 2015, hal. 140

Internal (SPI) sebanyak 5.858 kasus. Berikut tabel penjelasan kasus kelemahan sistem pengendalian internal:

Tabel 1.1
Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.753
2	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.826
3	Kelemahan struktur pengendalian internal	1.279
Jumlah		5.858

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019 diolah, 2020

Selain itu, BPK juga mengungkap adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.259 kasus. Permasalahan yang ditemui BPK di lapangan seperti misalnya kekuarangan volume pekerjaan atau barang, belanja tidak sesuai dari ketentuan, kelebihan pembiayaan, biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dari yang telah ditetapkan, spesifikasi barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan permasalahan lainnya. Dari permasalahan tersebut, mengakibatkan kerugian dengan total sebesar 2,19 triliun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kelompok Temuan Akibat Keidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2018

No	Kelompok Temuan	Permasalahan	
		Jumlah Kasus	Nilai (Miliar Rupiah)
1	Kerugian daerah	2.642	1.304,81
2	Potensi kerugian daerah	426	308,85
3	Kekurangan penerimaan	933	577,78
4	Penyimpangan administrasi	2.258	-
Jumlah		6.259	2.191,44

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019 diolah, 2020

Mengenai perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK juga telah menyajikannya di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester I selama lima tahun, mulai dari tahun 2014 hingga 2018. Meskipun jumlah kasus masing-masing pada sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan atas perundang-undangan lebih dari 5000 kasus, tetapi hasil pemeriksaan LKPD dinilai semakin membaik setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dari data BPK dalam persentase LKPD dari tahun 2014-2018 yang menunjukkan terjadinya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penjelasan perkembangan LKPD dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2018

Tahun	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2014	252	47%	247	46%	5	1%	35	6%	539
2015	313	58%	194	36%	4	1%	31	5%	542
2016	378	70%	141	26%	0	0%	23	4%	542
2017	411	76%	113	21%	0	0%	18	3%	542
2018	443	82%	86	16%	0	0%	13	2%	542

Sumber: www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019 diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 539 LKPD yang diperiksa pada tahun 2014 dimana BPK memberikan opini WTP untuk 252 entitas, opini WDP untuk 247 entitas, opini TW untuk 5 entitas, dan opini TMP untuk 35 entitas. Setiap tahunnya, dari tahun 2014 hingga tahun 2018 opini WTP terus menunjukkan peningkatan. Selama periode tersebut, peningkatan opini WTP naik sebesar 35%, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Kebalikannya, opini WDP, TW,

dan TMP yang dikeluarkan BPK atas LKPD terus mengalami penurunan dimana penurunan opini WDP sebesar 30% (dari 46% menjadi 16%), opini TW sebesar 1% (dari 1% menjadi 0%), dan opini TMP sebesar 4% (dari 6% menjadi 2%). Walaupun data BPK memperlihatkan pemeriksaan LKPD semakin membaik dari tahun ke tahun, namun terdapat beberapa LKPD yang mengalami penurunan opini. Terdapat 15 dari 542 LKPD tahun 2018 yang mengalami penurunan opini dimana penurunan opini tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan penurunan opini tahun 2017 yaitu sebanyak 14 dari 542 LKPD. Salah satu LKPD yang mengalami penurunan opini yaitu Pemkab Tulungagung dari opini WTP menjadi WDP. Dengan begitu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan dan mempertahankan penyajian LKPD secara wajar dan berkualitas, sehingga dapat menghasilkan opini WTP yang menggambarkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara baik.

Wakhyudi dalam Ali Fikri menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan penyajian LKPD yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kokoh dan adanya peran audit internal dalam mencapai tujuan suatu entitas. Besaran kasus kelemahan SPI yang dirasa masih tinggi, menjadikan pemerintah untuk terus memperbaiki dan membenahi kekurangannya dalam meminimalisir kesalahan sehingga dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara kontinu melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan dalam laporan

keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepercayaan atas pencapaian tujuan organisasi yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Sedangkan peran audit internal yaitu melakukan pengawasan dan pengevaluasian mengenai kebijakan, prosedur, dan laporan keuangan yang telah dihasilkan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

Selain itu, dalam membuat dan menyajikan LKPD tentu diperlukan peran pegawai yang mumpuni dan kompeten agar dapat mengelola transaksi keuangan menjadi laporan keuangan sesuai karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan di Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karenanya, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dan paham akan peraturan kepatuhan perundang-undangan dalam menyajikan laporan keuangan. Tanpa adanya kemampuan dan kompetensi dalam memahami dan mengelola laporan keuangan, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan terdapat ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung”**.

⁶ M. Ali Fikri Biana Adha Inapty dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 9 No. 1, April 2016, hal. 29-30

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, telah dikemukakan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguatnya tuntutan masyarakat atas keterbukaan dan pertanggungjawaban informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal yang dibuktikan dengan ditemukannya 5.858 kasus kelemahan sistem pengendalian internal.
3. Terjadinya penyimpangan data dan penyajian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini.
5. Diperlukan pegawai yang mumpuni dan berkompeten untuk mengelola transaksi keuangan menjadi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan penelitian antara lain:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung?

2. Apakah peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah sistem pengendalian internal, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris, tambahan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ilmu dibidang akuntansi sektor publik. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian sejenis tetapi dengan variabel, analisis, atau model penelitian yang berbeda.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi Institusi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi andil dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan tambahan koleksi ilmiah untuk koleksi perbendaharaan di perpustakaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sumber informasi, masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Terkait luasnya ruang lingkup mengenai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, maka peneliti telah menentukan variabel independen yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan agar bisa dikaji lebih mendalam. Adapun variabel independen tersebut yaitu sistem pengendalian internal (X_1), peran audit internal (X_2), dan kompetensi sumber daya manusia (X_3). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Untuk subjek penelitiannya adalah pegawai yang melaksanakan fungsi dibidang akuntansi atau dibidang keuangan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel independen, sedangkan masih banyak faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, adanya keterbatasan penelitian menggunakan kuisioner yang terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran, maka berikut dijelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Definisi Konseptual

- a. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipersiapkan untuk memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi mengenai efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi, kesesuaian organisasi dengan peraturan yang berlaku, serta keandalan dalam pelaporan keuangan.⁷
- b. Peran audit internal merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi.⁸

⁷ George H. Bodnar dan William S. Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, terj. Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 11

⁸ Abdul Halim, *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Edisi 5, Cet. ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 10

- c. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu target atau tujuan organisasi.⁹
- d. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang memaparkan kinerja keuangan dalam entitas tersebut.¹⁰

2. Definisi Operasional

- a. Sistem pengendalian internal adalah proses untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya melalui kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- b. Peran audit internal adalah proses pemeriksaan dan pengawasan oleh auditor yang bekerja di dalam suatu entitas untuk menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional entitas.
- c. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan eksistensi organisasi tersebut.
- d. Kualitas laporan keuangan pemerintah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam menggunakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja daeran (APBD).

⁹ Choirul Saleh, dkk., *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, (Malang: UB Press, 2013), hal. 66

¹⁰ Moermahadi S. Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori Praktik, dan Permasalahan*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), hal. 1

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sistematika pembahasan skripsi digunakan untuk memudahkan penjelasan mengenai penyusunan skripsi yang di dalamnya terdiri dari kesuruhan isi penelitian Berikut isi sistematika pembahasan skripsi:

- Bagian Awal** Terdiri dari halaman sampul depan; halaman judul; halaman persetujuan; halaman pengesahan; motto; persembahan; kata pengantar; daftar isi; daftar gambar; daftar lampiran, transliterasi; dan abstrak.
- BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah; dan sistematika pembahasan skripsi.
- BAB II** Landasan Teori yang terdiri dari teori yang membah variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya; kajian penelitian terdahulu; kerangka konseptual; dan hipotesis penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel, dan skala pengukuran; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; serta teknik analisis data.

- BAB IV** Hasil Penelitian yang terdiri dari hasil penelitian dimana di dalamnya berisi mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis.
- BAB V** Pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.
- BAB VI** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
- Bagian Akhir** Terdiri dari daftar pustaka; lampiran-lampiran; surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.